



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 30 Mei 2018/Periodik - 2017)

**BIDANG** : YUDIKATIF  
**LEMBAGA** : MAHKAMAH KONSTITUSI  
**UNIT KERJA** : SEKRETARIAT JENDERAL

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : KURNIASIH PANTI RAHAYU
2. Jabatan : KEPALA BAGIAN TATA USAHA KEPANITERAAN DAN RISALAH
3. NHK : 64783

**II. DATA HARTA**

<b>A. TANAH DAN BANGUNAN</b>	<b>Rp.</b>	<b>2.970.948.000</b>
1. Tanah dan Bangunan Seluas 110 m2/85 m2 di KOTA JAKARTA BARAT , HASIL SENDIRI Rp. 1.100.722.000		
2. Tanah dan Bangunan Seluas 252 m2/70 m2 di BANYUMAS, HASIL SENDIRI Rp. 166.974.000		
3. Tanah dan Bangunan Seluas 392 m2/70 m2 di BANYUMAS, HASIL SENDIRI Rp. 230.534.000		
4. Tanah dan Bangunan Seluas 165 m2/48 m2 di TANGERANG, HASIL SENDIRI Rp. 471.420.000		
5. Tanah dan Bangunan Seluas 62 m2/76 m2 di KOTA JAKARTA BARAT , HASIL SENDIRI Rp. 629.298.000		
6. Tanah dan Bangunan Seluas 222 m2/73 m2 di BANYUMAS, HASIL SENDIRI Rp. 372.000.000		
<b>B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN</b>	<b>Rp.</b>	<b>552.000.000</b>
1. MOTOR, HONDA CMX500AH Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 145.000.000		
2. MOBIL, HONDA BR-V Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 263.000.000		
3. MOBIL, HONDA BRIO Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 144.000.000		
<b>C. HARTA BERGERAK LAINNYA</b>	<b>Rp.</b>	<b>334.750.000</b>
<b>D. SURAT BERHARGA</b>	<b>Rp.</b>	<b>----</b>
<b>E. KAS DAN SETARA KAS</b>	<b>Rp.</b>	<b>937.751.229</b>
<b>F. HARTA LAINNYA</b>	<b>Rp.</b>	<b>----</b>
<b>Sub Total</b>	<b>Rp.</b>	<b>4.795.449.229</b>
<b>III. HUTANG</b>	<b>Rp.</b>	<b>432.887.062</b>
<b>IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)</b>	<b>Rp.</b>	<b>4.362.562.167</b>

## Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang



- bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
  3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **26 Oktober 2018**.
  4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.